

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM INOVASI DAERAH**  
**(Studi Kasus : Pembangunan Taman Median Jalur Hijau**  
**Km.55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci)**

**NASRUDDIN**

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

e-mail : [nashandesto@gmail.com](mailto:nashandesto@gmail.com)

Histori artikel	Abstrak
<b>Received:</b> 20 Juni 2023	<p>Pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci merupakan suatu program/kegiatan yang dilatarbelakangi oleh ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih kurang, ketidakmampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan kenaikan yang tidak signifikan, sedangkan pembangunan harus terus dilakukan. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan harus melakukan suatu upaya pembangunan yang bersifat inovatif, kreatif dan adaptif. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dengan pihak perusahaan sebagai aktor utama pembiayaan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam inovasi daerah pada pembangunan taman median jalur hijau km.55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan kolaboratif dalam inovasi daerah pada pembangunan taman median jalur hijau km.55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci yang dilakukan oleh lima aktor berdasarkan konsep <i>Penta Helix</i> (PH), yaitu Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pihak ketiga (perusahaan), akademisi, media center dan masyarakat. Analisis proses kolaborasi dilakukan ada 4 (empat) tahap, yaitu: 1) kondisi awal, 2) institusional kelembagaan, 3) kepemimpinan fasilitatif, dan 4) proses kolaborasi. Pada tahap proses kolaborasi dilakukan dengan cara dialog tatap muka, peninjauan lapangan, pembangunan dan penyerahan aset. Hasilnya mendapatkan kontribusi pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Tata kelola kolaboratif, taman median jalur hijau, inovasi daerah</i></p> <p><i>The construction of the km. 55 green lane median park- Simpang Kualo Pangkalan Kerinci, is a program/ activity that is motivated by the lack of Green Open Space (RTH) and the Inability of The Regional Budget (APBD) while development must be always taken placed. So that, the Regional Government of Pelalawan Regency needs to enforce development efforts</i></p>
<b>Accepted:</b> 25 Juni 2023	
<b>Published:</b> 30 Juni 2023	

<b>How to cite:</b>	Nasruddin. (2023). Collaborative governance dalam inovasi daerah (studi kasus: pembangunan tanah median jalur hijau km.55- Simpang Sualo Pangkalan Kerinci), 1(1)
<b>E-ISSN:</b>	2988-5833
<b>Published by:</b>	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pelalawan

---

*that are innovative, creative and adaptive. For this reason, collaboration with the company as the main actor in financing is required. The purpose of this study is to identify and analyze how the pattern of collaborative governance implementation in regional innovation in the construction of the km. 55 Green Lane Median Park- Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. This research uses qualitative analysis using descriptive research. The result of this research is collaborative action in regional innovation in the construction of the Km. 55 Green Lane Median Park- Simpang Kualo Pangkalan Kerinci which is carried out by 5 actors based on the Penta Helix (PH) concept, namely the Pelalawan Regency Government, third parties (companies), academics, media center and society. Analysis of the collaboration process is carried out in 4 (four) stages, namely: 1) initial conditions, 2) Institutionalization, 3) facilitative leadership, and 4) collaboration processes. At this stage of the collaboration process is carried out by face-to-face dialogue, field observations, construction and transfer of assets. The result of this research will contribute to improve development financing and the quality of the environment and society.*

**Keywords:** Collaborative governance, green lane median park, regional innovation

---

## PENDAHULUAN

Salah satu pakar yang mengemukakan pendapat tentang pentingnya melakukan *collaborative governance* adalah Ansel dan Gash. Ansel and Gash (2007) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* penting dilakukan antara lain adalah karena dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi dan tumbuhnya pengetahuan dan kapasitas institusi atau organisasi seiring dengan pengalaman pengalaman yang diperoleh dari lingkungan selama organisasi tersebut bekerja dalam rentang waktu tertentu.

Penyediaan RTH diatur di dalam Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa ruang terbuka hijau sebagai salah satu ruang publik harus memiliki luasan minimal yang ideal. Untuk RTH perkotaan yaitu 30% dari luas total suatu wilayah kota. Luasan ini terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten serta digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk dalam jenis RTH publik adalah RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu.

Dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dibutuhkan peran dari pihak swasta seperti bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara ruang terbuka hijau serta mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (Permen PU No. 5 Tahun 2008). Salah satu bentuk peran dari pihak swasta adalah adanya penyediaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan

para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Kebijakan mengenai CSR tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Collaborative governance* dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana RTH publik sudah cukup banyak diterapkan di Indonesia, diantaranya adalah revitalisasi Taman Bungkul yang terletak di Kota Surabaya. Revitalisasi tersebut merupakan salah satu program CSR Telkom Divre V Jawa Timur yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya (Syafrialia, 2008). Tidak hanya Taman Bungkul, revitalisasi Taman Lansia yang terletak di Kota Bandung juga merupakan salah satu bentuk program CSR dari Telkom. Dimana Pemerintah Kota Bandung dan PT. Telkom bekerja sama membangun wifi.id yang merupakan layanan publik internet berbasis teknologi *wireless fidelity* (Anindita & Suwandono, 2016).

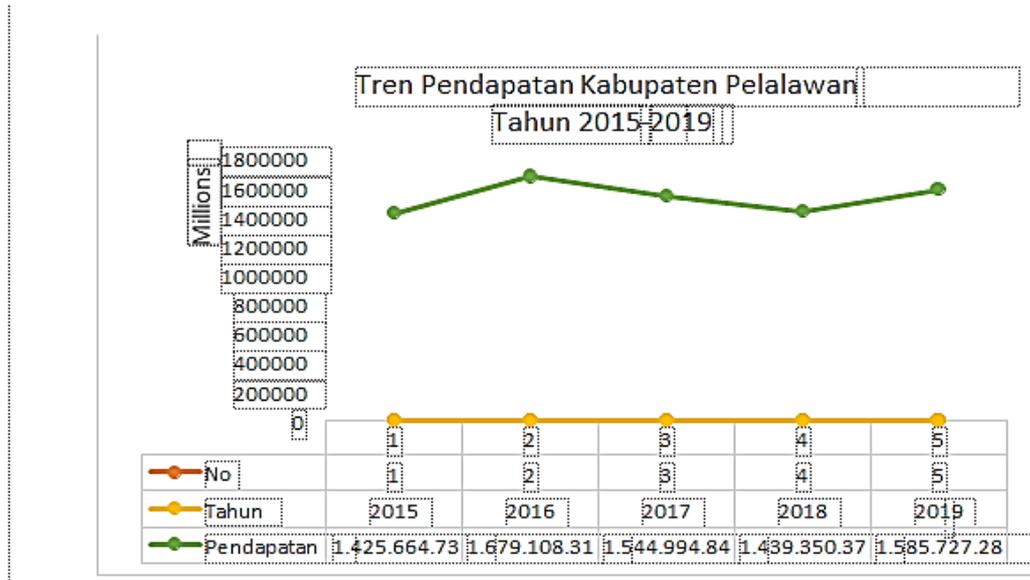
Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, tahun 2018 luas RTH publik di kawasan perkotaan Pangkalan Kerinci masih sebesar 45,93 Ha (2,72%). Luasan ini jauh di bawah luas RTH publik yang seharusnya yakni 20% setara dengan 1.124,78 Ha untuk kawasan perkotaan Pangkalan Kerinci. Sedangkan pencaanangan RTH khusus median jalur hijau km.55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci dibagi dalam 16 (enam belas) segmen, sekitar 80 (delapan puluh) sub segmen yang berada di sepanjang jalur hijau km. 55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Namun konsep kolaborasi yang ditawarkan kepada pihak swasta tersebut ada 14 (empat belas) segmen sebanyak 62 (enam puluh dua) sub segmen dengan jarak antar sub segmen rata-rata 100,00 meter. Artinya seluas + 8 ha RTH yang dibangun dengan model *collaborative governance*.

Salah satu penyebab belum terpenuhi proporsi 20% adalah karena Pemerintah Kabupaten Pelalawan memiliki kendala keterbatasan dana APBD untuk mengembangkan RTH publik. Berdasarkan tren pendapatan Kabupaten Pelalawan dari tahun 2015-2019, menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Pelalawan tidak mengalami kenaikan yang signifikan Gambar 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pertamanan dan RTH Kabupaten Pelalawan, Karunia (2020), bahwa dana APBD itu hanya sekitar Rp.2,6 Milyar, dimana hanya cukup untuk kegiatan pengelolaan pertamanan RTH publik, sehingga untuk melakukan pengembangan dan pembangunan RTH publik Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengalami kesulitan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan model *Collaborative governance*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pengembangan RTH publik pada taman jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci yang dikembangkan melalui program CSR dengan konsep *collaborative governance* masih

belum optimal. Disamping itu juga, model *collaborative governance* berawal dari hasil *review* jurnal internasional yang dilakukan. Berdasarkan hasil *review crosstab query* yang telah dilakukan, peneliti sangat tertarik untuk membahas suatu teori dan model yang masih dianggap relevan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu berkaitan dengan model *collaborative governance* dalam pembangunan.



**Gambar 1. Tren Pendapatan Kabupaten Pelalawan tahun 2015-2019**

Sumber ; BPKAD Kab.Pelalawan dan Olahan Penulis, 2020

Sementara itu kondisi empiris yang terjadi dalam inovasi daerah pada pembangunan taman jalur hijau km.5 5 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci sebagai berikut:

- a. Pembangunan taman jalur hijau yang di mulai pada tahun 2017 hingga sekarang, dari 62 segmen yang sudah terealisasi baru 12 segmen, artinya penerapan kolaborasi dengan pihak swasta dapat dikatakan belum optimal;
- b. Pembangunan segmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang berkolaborasi dengan pihak swasta (perusahaan) yang berada di Kabupaten Pelalawan tidak secara beraturan;
- c. Sarana dan prasarana penunjang pembangunan taman sepanjang jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci berdasarkan segmen yang telah disepakati oleh pihak swasta (perusahaan) dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan sering rusak bahkan hilang, seperti tong sampah dan sebagainya;
- d. Pemilihan segmen oleh pihak swasta (perusahaan) masih memiliki ego sektoral (ego-bisnis) terkait dengan kerugian biaya pembangunan yang dilakukan.

## TUJUAN

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Inovasi Daerah (Studi Kasus : Pembangunan Taman Median Jalur Hijau Km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci)”. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola pelaksanaan *collaborative governance* dalam inovasi daerah pada pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci?”.

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan *collaborative governance* dan menganalisis faktor-faktor penghambat *collaborative governance* dalam inovasi daerah pada pembangunan taman median jalur hijau km. 55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci.

Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya ilmu administrasi publik, pembiayaan penyediaan fasilitas publik yang berkaitan dengan pembangunan RTH publik khususnya taman jalur hijau melalui model *collaborative governance*. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan pihak swasta dalam pembangunan RTH publik khususnya taman jalur hijau melalui model *collaborative governance*

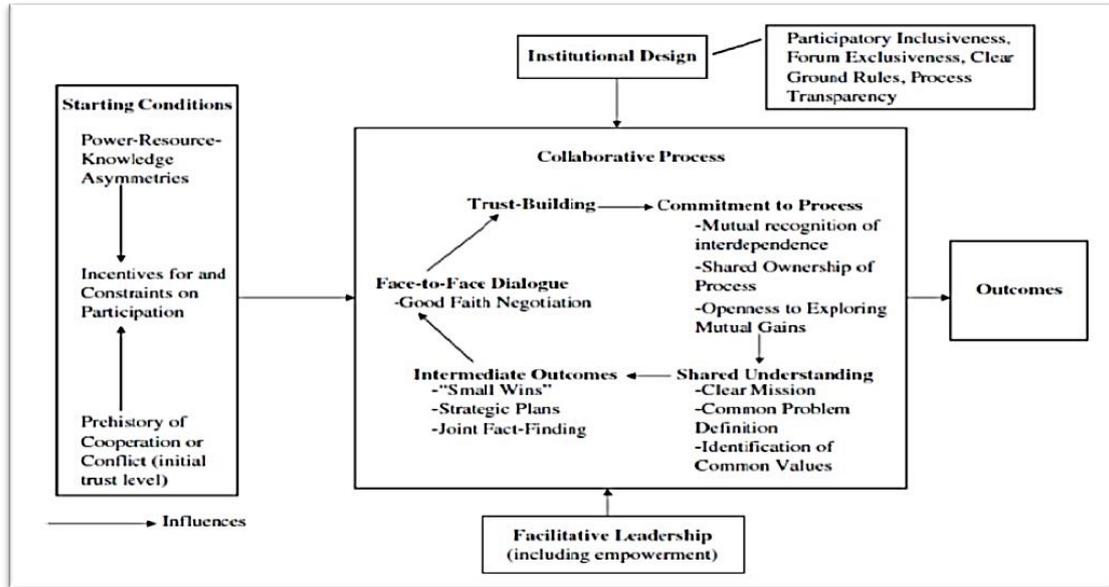
## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep *Collaborative Governance*

Proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap *stakeholder* yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Ansell & Gash (2007) dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan berikut (Gambar 2):

- a. **Starting condition.** Dimensi ini sangat mempengaruhi proses kolaborasi berjalan baik atau tidak, karena *starting condition* (kondisi awal) dapat memfasilitasi atau menghambat kerjasama antar *stakeholder* dan antar lembaga dan *stakeholder*.
- b. **Institutional Design.** Proses kolaborasi juga dipengaruhi oleh dimensi *institutional design* atau desain kelembagaan. Kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi.
- c. **Facilitate Leadership.** Kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa *stakeholder* bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan konsensus.
- d. **The Collaborative Process.** Dimensi ini menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Proses kolaboratif merupakan sebuah siklus yang sering tampak bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara berbagai dimensinya. Ansell & Gash (2007) memulai dengan 1) *Face to face*

dialogue, 2) Trust building, 3) Commitment to process, 4) Share Understanding dan 5) Intermediate outcomes.



**Gambar 2. Model Kolaborasi Ansell & Gash (2007)**

Bentuk model Pemerintahan Kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007) memiliki manfaat yang dapat digunakan bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Model Kolaborasi ini menyederhanakan bentuk variable yang cakupannya terlalu meluas. Evaluasi hasil proses identik dengan rumusan permasalahan yang membahas apakah mereka melakukan negosiasi dengan itikad baik? Apakah para *stakeholders* melakukan kolaborasi atas dasar mengejar tujuan bersama? Apakah *stakeholders* terlibat mencapai consensus selama proses? Banyak pemerintahan kolaborasi lainnya yang sering digunakan.

## B. Peneliti Terdahulu

Berdasarkan Boushey (2012) Teori Keseimbangan Terpusat dari Difusi Inovasi, artikel ini dibangun atas teori keseimbangan terpusat untuk mengevaluasi difusi inovasi kebijakan publik di Amerika Serikat. Artikel ini berpendapat bahwa teori keseimbangan terpusat (*punctuated equilibrium*) menyediakan kerangka kerja pemersatu untuk mengecilkan tiga mekanisme yang mengarah ke difusi inovasi: difusi kebijakan bertahap didorong oleh emulasi kebijakan tambahan, difusi cepat antar negara yang didorong oleh contoh kebijakan, dan difusi kebijakan yang hampir segera didorong oleh respons tingkat negara bagian terhadap guncangan eksogen yang umum. Berdasarkan model difusi pengaruh campuran Bass, penelitian ini menghasilkan ukuran koefisien pengaruh eksternal dan internal untuk difusi untuk 81 inovasi kebijakan publik yang telah menyebar di seluruh Amerika Serikat. Artikel tersebut kemudian mengevaluasi bagaimana citra kebijakan dan partisipasi langsung pemerintah federal berkontribusi pada pola difusi yang berbeda dari waktu ke waktu.

Kemudian menurut Angelo *et al.* (2012), teori tentang inovasi hijau/lingkungan dimana tujuan dari artikel ini adalah untuk mengusulkan definisi istilah "inovasi hijau/lingkungan", berdasarkan tinjauan literatur sistematis. Desain/ metodologi/ pendekatan: tinjauan literatur yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada artikel yang diterbitkan dalam *ISI Web of Science* dan *database Scopus*. Temuan: Inovasi lingkungan adalah implementasi organisasi dan perubahan yang berfokus pada lingkungan dengan implikasi untuk produk perusahaan, proses manufaktur, dan pemasaran dengan berbagai tingkat kebaruan. Mereka dapat semata-mata merupakan peningkatan bertahap yang mengintensifkan kinerja sesuatu yang sudah ada, atau yang radikal yang mempromosikan sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan perusahaan. Selain itu, inovasi lingkungan memiliki hubungan bilateral dengan tingkat manajemen lingkungan proaktif yang diadopsi oleh perusahaan. Peningkatan inovasi lingkungan cenderung menghadapi banyak hambatan. Orisinalitas/ nilai. Banyak peneliti menggunakan istilah "inovasi lingkungan" tetapi hanya beberapa artikel yang menyajikan definisi lengkap dari konsep ini.

Menurut Nasrulhaq (2014), *Collaborative Governance* Dalam Program Makassar *Green and Clean* (MGC) 2008-2013, penelitian ini melihat dari tahun 2008 sampai 2013, upaya *collaborative governance* untuk sektor lingkungan hidup dipraktekkan di Kota Makassar melalui program Makassar MGC. Berlangsungnya aksi *collaborative governance* dalam program MGC dilihat dalam konteks dinamika kebijakan karena melibatkan banyak pihak. Menggunakan isu-isu utama *collaborative governance* seperti keterlibatan, motivasi dan kapasitas dinamis menjadi dimensi dalam penelitian ini. Hanya saja penggunaan konsep *collaborative governance* tidak secara komprehensif, karena lebih melihat pada implementasi kebijakan.

Berdasarkan *review* dari beberapa jurnal pada penelitian terdahulu diatas, sebagian peneliti terdahulu sama-sama menggunakan konsep inovasi dalam pengembangan teknologi perusahaan, tetapi sebagian ditemukan hasil penelitian terdahulu sudah sama-sama melakukan konsep inovasi dengan menggunakan model *collaborative governance*, tetapi belum ada yang melakukan penelitian tentang *collaborative governance* dalam inovasi daerah pada pembangunan taman jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Sehingga peneliti kembali menegaskan bahwa penelitian ini relatif baru untuk dilakukan khususnya di bidang Ilmu Administrasi, karena objek penelitian, locus penelitian belum pernah diteliti sebelumnya dalam menggunakan konsep *collaborative governance*. Kemudian secara substansi penelitian terdapat adanya relasi atau hubungan pemerintahan daerah dengan pihak swasta (perusahaan) yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Namun dalam model ini, peneliti ingin menganalisis dan memberikan gambaran mengenai bentuk kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan taman median jalur hijau km. 55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci dengan Konsep CSR. Model pada gambar berikut memiliki empat variabel, diantaranya a) kondisi awal; b) bentuk kelembagaan; c) kepemimpinan; dan d) proses kolaborasi. Dari keempat variabel di atas, variabel utama dalam model

kolaborasi Ansell dan Gash adalah proses kolaborasi. Kemudian, tiga variabel lainnya merupakan variabel pendukung pada proses kolaborasi yaitu kondisi awal, bentuk kelembagaan dan kepemimpinan (Tabel 1).

**Tabel 1. Variabel Penelitian**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	
Menurut Ansell dan Gash <i>Collaborative Governance</i> merupakan bentuk baru dari <i>governance</i> yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikutsertakan banyak pihak didalam prosesnya. Keikutsertaan stakeholders seperti aktor privat dan aktor pemerintah menjadi penting untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan, 2007.	Kondisi Awal	Sumber daya dan wewenang	1. Pengelolaan fasilitas RTH 2. Bentuk tanggungjawab stakeholders 3. Sistem pendanaan	
		Sejarah kolaborasi	1. Terbentuknya kolaborasi 2. Ide/gagasan (inisiator) kolaborasi	
		Desain Institusional	Dasar pembentukan	1. Dasar hukum 2. SOP pelaksanaan 3. Nota kesepakatan
	Kepemimpinan Fasilitatif	Stakeholders' yang terlibat	Media koordinasi	1. Pembentukan tim yang terlibat 2. Penunjukan stakeholders yang berkolaborasi
			Pengawasan	1. Cara penyampaian informasi 2. Manfaat informasi yang dilakukan
			Dialog Tatap Muka	1. Bentuk pengawasan 2. Skala pengawasan
	Proses Kolaborasi	Peninjauan Lokasi	Pembangunan	1. Pola kolaborasi yang dilakukan 2. Pendekatan kolaboratif dengan stakeholders 3. Letak inovasi dari kolaborasi 4. Strategi kolaborasi
			Pembangunan	1. Status lahan 2. Kesesuaian perencanaan
			Pembangunan	1. Keterlibatan kolaborasi 2. Pembiayaan pembangunan
			Penyerahan Aset	1. Penyerahan ceremonial 2. Tanda tangan permeja

Sumber: Olahan Penulis, 2020

## METODELOGI

Studi dilakukan di median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan pola pelaksanaan *Collaborative Governance* pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan inventarisasi data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh berdasarkan data empiris lapangan melalui tehnik: observasi bersifat *open-ended*, wawancara dengan melakukan *face-to-face interview* dengan partisipan, wawancara melalui telepon, atau terlibat dalam *focus group interview*, dokumentasi baik bersumber dari koran, makalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan *collaborative governance* dan inovasi kebijakan, kemudian bersumber dari materi *audio-visual* seperti foto, videotape, rekaman suara dan sebagainya. Selanjutnya data

yang terkumpul, dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan model interaktif (Creswell, 2014).

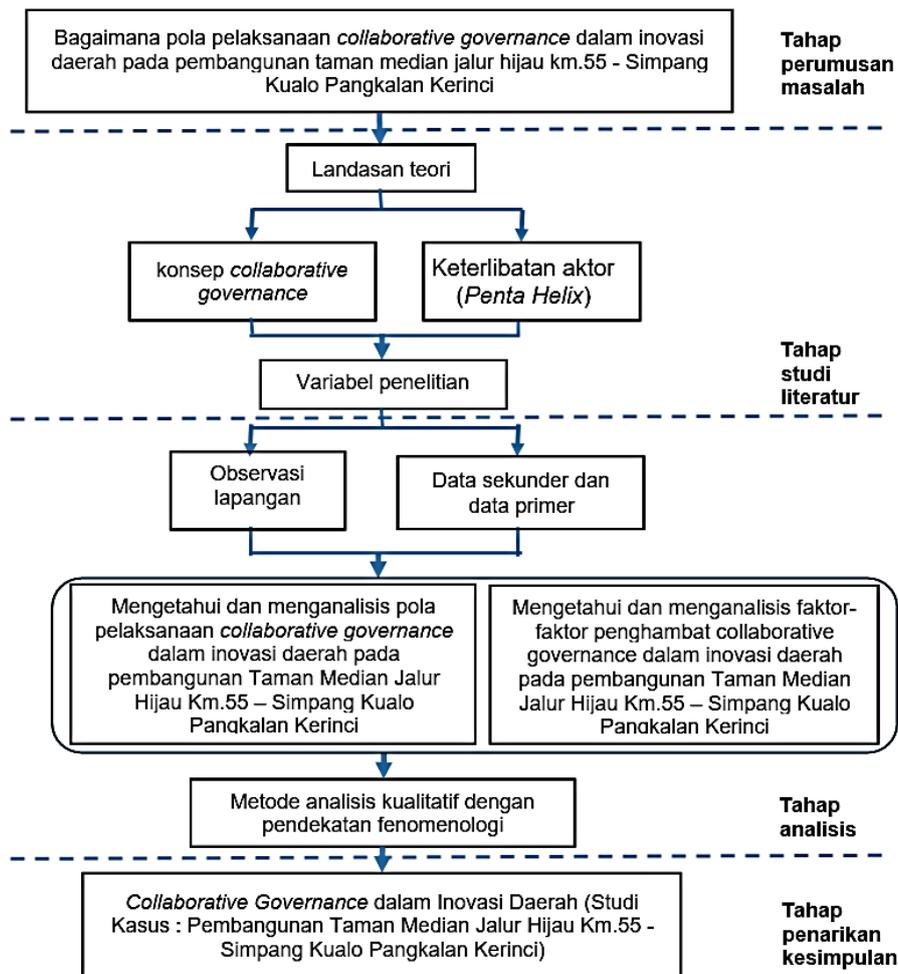
Populasi dan teknik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* ini merupakan metode yang digunakan melalui penunjukan langsung mengenai responden yang dianggap merupakan stakeholder's yang ahli atau pakar yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun Stakeholders Ahli atau Pakar sebagai Responden Penelitian ini adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Responden Penelitian**

No	Instansi/ Lembaga	Jabatan	Alasan
1.	Bappeda Kabupaten Pelalawan	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Merupakan aktor yang memfasilitasi kegiatan <i>collaborative governance</i>
2.	Balitbangda Kabupaten Pelalawan	Kepala Badan	Merupakan pakar yang membidangi inovasi daerah
3.	PT. EMP Bentu	<i>Internal and Eksternal Relation Coordinator</i>	Merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pembangunan dengan konsep <i>collaborative governance</i>
4.	PT. Bumi Siak Pusako	<i>Coorporate Secretary</i>	Merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pembangunan dengan konsep <i>collaborative governance</i>
5.	Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) Kabupaten Pelalawan	Wakil Ketua ST2P	Merupakan salah satu dosen yang membidangi akademisi yang ikutserta dalam <i>collaborative governance</i> Kabupaten Pelalawan
6.	Media Center Kabupaten Pelalawan	Harian Pagi Dumai Pos	Merupakan salah satu media informasi yang pernah melakukan publikasi mengenai program pembangunan taman media jalur hijau
7.	Masyarakat Kabupaten Pelalawan	Tokoh Masyarakat	Responden akan di tunjuk karena di anggap dapat mewakili masyarakat Kabupaten Pelalawan dalam program pembangunan

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Penulis menggunakan model *Penta Helix* (PH) dikarenakan model PH merupakan suatu model yang memiliki persepsi yang lengkap artinya banyak *stakeholder* yang terlibat di dalam *collaborative governance* pembangunan taman jalur hijau km.55 – Simpang Kualo Pangkalan Kerinci, diantaranya Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pihak swasta/ perusahaan, akademisi, media center dan masyarakat. Sehingga dengan banyak stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya guna kelengkapan dalam menganalisis penelitian ini. Dari penjelasan di atas, maka kerangka penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4.



**Gambar 4. Kerangka Penelitian**

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

## PEMBAHASAN

### A. Aktor Governance

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model *Penta Helix (PH)*, hal ini dikarenakan model PH merupakan suatu model yang memiliki persepsi yang lengkap artinya banyak *stakeholder* yang terlibat di dalam *collaborative governance* dalam inovasi daerah (studi kasus: pembangunan taman jalur hijau km.55 – simpang kualo Pangkalan Kerinci), diantaranya Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pihak swasta/perusahaan, akademisi, media center dan masyarakat. Sehingga dengan banyak stakeholders yang terlibat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya guna kelengkapan analisis.

## **B. Collaborative Governance Pembangunan Taman Median Jalur Hijau Km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci**

Sebelum proses kolaborasi dilakukan, beberapa keadaan mampu membentuk mengapa sebuah kolaborasi harus dilakukan. Keadaan ini disebut sebagai kondisi awal, yakni beberapa situasi yang membentuk pemerintahan kolaboratif dilakukan pada pembangunan taman jalur hijau km. 55- Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Banyak hal yang mendukung terbentuknya pemerintahan kolaboratif pada pembangunan taman jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci, diantaranya:

### **1. Kondisi Awal**

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Bidang Ekonomi dan Kerjasama Bappeda merupakan aktor yang merencanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan taman jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Disamping kegiatan yang dipersiapkan sebagai bentuk atau wadah koordinasi *governance*, maka pemerintah juga mempersiapkan secara teknis desain kawasan. Di dalam desain kawasan tersebut terdiri dari beberapa segmen dan batasan kawasan perencanaan memiliki panjang ruas jalan/median sepanjang 8,30 km dengan lebar median 13,00 m dan lebar trotoar rata-rata 4,00 - 5,00 m.

#### **a. Sumberdaya dan wewenang**

Dari sumberdaya yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan harus mempersiapkan anggaran. Dimana semakin banyak segmen taman median jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci yang dibangun oleh pihak perusahaan, maka secara otomatis Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan harus menyiapkan anggaran untuk tenaga kerja/petugas taman tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa satu segmen taman menjadi tanggungjawab oleh dua orang petugas taman, artinya dengan kondisi tenaga kerja/petugas taman median tersebut yang dimiliki sekarang masih kurang sehingga hasil pemeliharaan taman belum optimal.

#### **b. Sejarah *collaborative***

Menurut teori dari Ansall and Gash (2007) menjelaskan ketika para *stakeholder* sangat saling tergantung, tingkat konflik yang tinggi sebenarnya dapat menciptakan insentif yang kuat untuk *collaborative governance*. Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa yang menjadi latar belakang konflik biasanya sangat berpengaruh dalam menjalankan proses kolaborasi, hal ini karena adanya perbedaan mendasar dari karakter dan kepentingan masing-masing *stakeholder*, hanya saja kesadaran saling membutuhkan akan menimbulkan interaksi yang dapat mengenyampingkan konflik yang terjadi.

Sedangkan hasil observasi di lapangan, penulis menemukan pembangunan taman median jalur hijau km.55- Simpang Kualo Pangkalan Kerinci telah melakukan konsep *collaborative governance*, dimana konsep tersebut muncul ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengalami permasalahan dalam perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan setiap tahunnya. Disamping itu juga, keterbatasan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan, dimana jalur hijau di median belum terjamah secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

## **2. Institusional Kelembagaan**

Terbentuknya suatu organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung yang didasari dengan dasar terbentuknya kelembagaan.

Proses kolaborasi dalam pembangunan taman jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci, memiliki partisipasi yang kuat dari berbagai pihak dan memiliki aturan dasar yang jelas mengatur pada setiap proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan dasar yang digunakan dalam menjalankan proses kolaborasi yang ada diantaranya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan.

## **3. Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa para *stakeholder* bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan consensus. Dalam konsep kolaborasi yang dilakukan pada pembangunan taman jalur hijau km. 55- Simpang Kualo Pangkalan Kerinci di lakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bidang Ekonomi dan Kerjasama.

**a. Stakeholder yang terlibat**

Adapun para stakeholder yang terlibat adalah dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, perusahaan, media, dan masyarakat (Tabel 3).

**Tabel 3. Aktor Collaborative Governance Dengan Model Penta Helix (PH)**

No	Nama Instansi	Profesi	Kegiatan	Realisasi
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan	Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Bappeda	Melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi mitra CSR/PKBL	Sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
		Kepala Balitbangda	Koordinator dalam melakukan inovasi daerah	Sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.	Akademisi	Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P)	Melakukan <i>research</i> dan tim inovasi daerah	Belum ada <i>research</i> yang berkaitan dengan lokus penelitian namun terlibat sebagai tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
3.	Perusahaan	<i>Internal and eksternal relation coordinator</i> PT.EMP Bentu	Pelaku usaha dibidang minyak dan gas	Telah melakukan pembangunan di lokus penelitian
		<i>Corporate secretary</i> PT. Bumi Siak Pusako	Pelaku usaha dibidang kelapa sawit	Telah melakukan pembangunan di lokus penelitian
4.	Media	Reporter	Menghimpun data yang diberitakan/dipublikasikan melalui media cetak, media online dan sebagainya	Publikasi kegiatan pembangunan
5.	Masyarakat	Tokoh masyarakat intelektual	Peran serta dalam pembangunan	Peran serta dalam rapat CSR/PKBL dan Musrenbang

Sumber. Penulis, 2020

## **b. Media koordinasi**

Melihat kondisi dilapangan terkait dengan pembangunan taman median jalur hijau km. 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci, penulis berpendapat bahwa koordinasi yang dilakukan selama ini adalah koordinasi bukan pimpinan langsung dari pihak perusahaan, kebanyakan bagian departemen atau humas perusahaan. Sehingga komunikasi dan koordinasi antara pimpinan daerah dengan pihak perusahaan tidak selevel, artinya keputusan tidak bisa diambil pada saat keberlangsungan forum, harus menjadikan tugas yang tertunda yang seharusnya bisa selesai kesepakatan pada saat itu, namun dilakukan komunikasi lebih lanjut kepada masing-masing pimpinan perusahaan.

Disamping itu, juga diperlukan rapat forum khusus sebagai koordinasi lanjutan, maksudnya ada tindak lanjut forum CSR masing-masing pihak perusahaan yang terlibat. Hal ini dikarenakan untuk menjaga privasi perusahaan yang sangat tertib administrasi dan kerahasiaan profit internal masing-masing perusahaan. Kemudian memberikan leluasa kepada pihak perusahaan untuk memberikan kontribusi dengan melakukan komunikasi dua arah yang lebih efektif dan efisien dari pada berkomunikasi pada forum yang sifatnya terbuka untuk umum.

## **c. Bentuk Pengawasan**

Pengawasan terhadap pembangunan median jalur hijau saat ini masih lemah, hal ini dilihat dari hasil tinjauan lapangan masih terdapat fasilitas taman yang mengalami kerusakan bahkan hilang sama sekali, contohnya penulis menemukan kerusakan pada tong sampah pemilah, masih ditemukan jenis tanaman bunga-bunga yang hilang dan mati.\

## **4. Proses Kolaboratif**

Dimensi ini menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Proses kolaboratif merupakan sebuah siklus yang sering tampak bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara berbagai dimensinya. Umpan balik dari kolaborasi mempengaruhi kolaborasi lebih lanjut. Proses kolaborasi dimulai dari dialog tatap muka, peninjauan lokasi, pembangunan hingga penyerahan aset.

### **a. Dialog tatap muka**

Dialog tatap muka dilakukan dengan rapat koordinasi dan sinkronisasi forum CSR Kabupaten Pelalawan. Forum yang dilakukan merupakan tindaklanjut dari forum musrenbang tingkat kabupaten. Disamping koordinasi secara teknis pelaksanaan pembangunan, juga dilakukan rapat tahunan sebagai bentuk laporan perusahaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Selain dilakukan rapat koordinasi, sebagai tindak

lanjut komunikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi berupa *WhatsApp group (WAG)* dengan tujuan mempermudah komunikasi yang akan disampaikan dan terjalin secara efektif dan efisien.

Disamping via telepon, juga dilakukan koordinasi dan informasi melalui portal CSR interaktif. Dimana portal ini mampu memberikan informasi program/kegiatan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang mendukung semua aspek prioritas pembangunan, baik aspek lingkungan, sosial, pendidikan dan sebagainya. Portal CSR interaktif merupakan salah satu bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dengan sentuhan teknologi yang mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan yang bersumber diluar anggaran pemerintah seperti APBD maupun APBN.

#### **b. Peninjauan lapangan**

Peninjauan lokasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk memastikan keberadaan segmen lokasi yang akan dibangun sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Kemudian kesesuaian secara teknis baik dari desain maupun pemilihan vegetasi tanaman yang sesuai dengan standar jenis tanaman untuk median jalur hijau. Pada proses kolaborasi, setelah dialog tatap muka dilakukan dan kesepakatan terbentuk, selanjutnya para pihak melakukan peninjauan lokasi. Secara ideal peninjauan lokasi dilakukan oleh anggota tim teknis dari perangkat daerah yang terkait, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya.

Peninjauan lokasi yang dilakukan berbagai pihak memiliki tujuan masing-masing, diantaranya untuk memastikan lokasi segmen yang akan dibangun. Namun dari hasil observasi melalui dokumentasi dan informasi yang didapat, tim teknis yang terlibat tidak semua tim yang ikut peninjauan lokasi, sehingga penulis menyimpulkan bahwa tim teknis belum melakukan tugas dan tanggungjawab secara optimal. Sehingga diperlukan evaluasi pembentukan tim teknis yang terkait, mengingat pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci belum selesai seluruh segmen yang akan bangun.

#### **c. Pembangunan**

Setelah peninjauan lokasi dilakukan, para pihak memulai untuk melakukan proses pembangunan taman median jalur hijau km 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci. Proses pembangunan taman median jalur hijau km 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci didasari dengan kesepakatan kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa tipologi yang dibangun adalah median jalur hijau dengan konsep kolaborasi yang ditawarkan kepada pihak swasta tersebut ada 14 (empat belas) segmen sebanyak 62 (enam puluh dua) sub segmen dengan jarak antar sub segmen rata-rata 100,00 meter. Artinya seluas  $\pm$  8 ha RTH yang dibangun dengan model *collaborative governance*. Namun segmen yang sudah terbangun baru 12 (dua belas) sub segmen, artinya sekitar 19,4% atau 50 sub segmen yang belum dibangun. Sehingga pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan harus lebih giat lagi dan melakukan koordinasi yang lebih baik kepada pihak perusahaan. Melakukan terobosan-terobosan baru yang bersifat inovatif seperti melakukan reward khusus pembangunan taman median jalur hijau km 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci.

#### **d. Penyerahan aset**

Setelah pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci selesai dilakukan, pihak perusahaan masih melakukan pemeliharaan selama 1 (satu) tahun yang menjadi tanggungjawab dari pihak perusahaan yang diberikan kewenangan pembangunan.

Penyerahan serah terima pekerjaan merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui penandatanganan berita acara tidak secara ceremonial tetapi tanda tangan di atas meja yang di hadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda Kabupaten Pelalawan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah bagian aset daerah Kabupaten Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan pihak perusahaan yang membangun berdasarkan segmen yang telah disepakati. Sebelum berita acara ditandatangani, hal yang pertama dilakukan adalah pengecekan lokasi dengan memeriksa hasil pekerjaan apakah sesuai dengan desain, RAB dan sebagainya.

#### **e. Outcomes**

Berdasarkan teori Ansall and Gash (2007), menyatakan bahwa hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi.

Dari kolaborasi yang dilakukan dalam pembangunan taman jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci memberikan *outcomes* diantaranya membentuk *icon* Pangkalan Kerinci sebagai keindahan taman jalur hijau masuk gerbang kota Pangkalan Kerinci dan pro lingkungan dari pihak swasta. Menurunnya lahan kosong jalur median jalan yang tidak berfungsi dan berubah menjadi ruang terbuka hijau, *image positif* untuk perusahaan dapat menjual melalui pemasangan lebel perusahaan sehingga dikenal oleh khalayak masyarakat menjadikan masyarakat dapat

menghirup udara segar. Sedangkan pihak Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mendapatkan kontribusi pendanaan dalam pembiayaan pembangunan taman jalur hijau km 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci.

### **C. Faktor Pendukung dan Faktor Pendorong**

#### **1. Faktor Pendorong**

Yang menjadi faktor pendorong *collaborative governance* dalam pembangunan taman median jalur hijau km 55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau khususnya kawasan perkotaan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus berupaya menambah jumlah luasan kawasan Ruang Terbuka Hijau dengan pemanfaatan lahan yang ada untuk difungsikan menjadi ruang publik dilengkapi dengan fasilitas pertamanan.
- b. Mengoptimalkan fungsi ruang publik pertamanan yang telah ada dengan terus menambah vegetasi serta sarana/prasarana pendukungnya, sehingga tidak ada lagi ruang kosong yang gersang, tandus dan panas.
- c. Salah satu kegiatan yang mendukung visi dan misi Bupati Pelalawan yaitu pelalawan inovatif dan pelalawan sehat. Dimana pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menata kembali taman-taman yang ada agar terlihat lebih indah, nyaman dan asri, sehingga dapat dirasakan langsung oleh publik manfaatnya.
- d. Ketersediaan sumber daya manusia dan mendorong pihak perusahaan dan masyarakat dalam pemenuhan pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci.

#### **2. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan pembangunan taman jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci tidak hanya faktor pendukung yang bisa dicermati oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, ada beberapa yang menjadi faktor penghambat *collaborative* adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Awal. Keterbatasan anggaran, kondisi tanah dan iklim lokal yang kurang mendukung perkembangan vegetasi tanaman
- b. Institusional Kelembagaan. Berdasarkan aturan tata ruang, masih sedikitnya luasan lahan yang bisa diperoleh langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk pengalokasian sebagai lahan ruang terbuka hijau.
- c. Kepemimpinan Fasilitatif. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan serta menjaga dan memelihara taman median jalur

hijau, masih belum atau masih ada perusahaan yang belum memberikan kontribusi, karena pertimbangan perusahaan yang ingin mendapatkan nilai jual (*ego sectoral*).

- d. Proses Kolaborasi. Kontrol pengawasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan yang masih lemah, sehingga sering mengabaikan aspek penghijauan.

## **SIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pola *Collaborative*, dimulai dari kondisi awal (sumber daya dan wewenang, sejarah kolaboratif), institusional (dasar pembentukan), kepemimpinan fasilitatif (stakeholder yang terlibat, media koordinasi, pengawasan) dan proses kolaborasi (dialog tatap muka, peninjauan lapangan, pembangunan dan penyerahan aset). Menemukan indikator variabel proses kolaboratif, yaitu penyerahan aset dari pihak perusahaan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
- b. Faktor pendorong (upaya-upaya terobosan yang inovatif), faktor penghambat (kontrol pengawasan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan yang masih lemah sehingga sering mengabaikan aspek penghijauan).

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dari pemerintah kepada pihak ketiga, karena masih lemahnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
- b. Tim teknis yang dibentuk masih belum melakukan tanggungjawab yang sepenuhnya sehingga diperlukan rumusan baru menetapkan anggota tim teknis yang terlibat seperti pelibatan semua aktor, pemerintah, perusahaan, akademisi, media dan masyarakat.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melihat lanjutan permasalahan, dibutuhkan analisis seperti apa kondisi akhir dari kolaborasi pembangunan taman median jalur hijau km.55 - Simpang Kualo Pangkalan Kerinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelo, F.D., Jabbour, C.J.C., & Galina, S.V. (2012). Environmental innovation: in search of a meaning. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, (8) 2/3. <https://doi.org/10.1108/20425961211247734>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Boushey, G. (2012). Punctuated Equilibrium Theory and the Diffusion of Innovations. *Policy Studies Journal*, 40 (1): 127– 145
- Creswell, J.W. (2014). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kabupaten Pelalawan. (2018). *Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*. Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pelalawan.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta.
- Nasrulhaq. (2014). *Collaborative Governance Dalam Program Makasar Green and Clean (MGC) 2008-2013*. Tesis S2 Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Jakarta.
- Raharja, S. (2010). Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 222–235. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/125>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan*. Sekretariat Negara. Jakarta.